

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Tata Ruang di Kecamatan Bungursari, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal. Meskipun Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, seperti pembangunan pada kawasan hijau, bangunan di sempadan sungai, serta alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, faktor yang memengaruhi implementasi tata ruang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dari seluruh faktor tersebut, keterbatasan pengawasan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta tingginya tekanan pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan tata ruang di Kecamatan Bungursari.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi tata ruang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh dinamika kepentingan antaraktor. Pemerintah daerah berupaya mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan tata ruang, sementara masyarakat dan pelaku usaha memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan. Kondisi tersebut menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tata ruang.

Belum optimalnya implementasi tata ruang memberikan dampak terhadap berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air, meningkatnya potensi banjir dan kerusakan lingkungan, serta munculnya potensi konflik terkait pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar tujuan penataan ruang yang berkelanjutan dapat tercapai

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang, khususnya di Kecamatan Bungursari, melalui pengawasan lapangan yang lebih intensif serta penindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan tata ruang serta berpartisipasi dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang demi terciptanya pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam implementasi kebijakan tata ruang, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam kajian implementasi kebijakan publik dan ilmu politik.

4. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Pemerintah kecamatan dan kelurahan perlu meningkatkan peran pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran tata ruang di wilayahnya masing-masing agar permasalahan pemanfaatan ruang dapat ditangani lebih cepat dan efektif.